BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1955 negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang baru memulai untuk menjadi negara yang berdemokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dimana rakyat berperan langsung dalam pemerintahan dan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat.[1] Sarana dari demokrasi adalah pemilihan umum yang ditujukan untuk menampung aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan Umum adalah mekanisme politik yang berhubungan erat dalam sistem politik demokrasi dengan harapan aspirasi politik yang berbeda akan menyalurkan aspirasi mereka lewat partai-partai politik atau calon-calon yang mereka dukung.[2] Pergeseran kekuasaan seperti pergantian pimpinan negara (suksesi) dan pimpinan pemerintahan, perubahan haluan negara dan politik secara konstitusional aman dan teratur tanpa kekacauan dan kekerasan atau kup adalah dengan pemilihan umum.

Indonesia merupakan negara yang baru tumbuh dan berkembang di kawasan Asia Tenggara pada kurun waktu 1945 sampai 1955 yang merupakan bekas jajahan dari bangsa Belanda. Negara-negara bekas jajahan yang baru merdeka kebanyakan memilih sistem demokrasi untuk pemerintahannya, tidak peduli negara yang bersangkutan benar-benar telah matang untuk menerapkan

---

[1] Hadi Wiyono, *Pendidikan Kewarganegaraan SMP VIII*, Jakarta: Ganeca Exact, 2007, hlm. 101.

[2] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 41.

sistem demokrasi atau belum. Pemilihan itu dilakukan atas pertimbangan bahwa bentuk demokrasi dianggap lebih baik dan lebih sesuai daripada kerajaan.[3] Penerapan sistem demokrasi memberi kesempatan yang luas kepada para pemimpin rakyat untuk memimpin pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan. Hal ini sangat berbeda dengan sistem kerajaan yang tidak memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Sejarah pemilihan umum di Indonesia dimulai pada awal zaman revolusi. Rencana untuk mengadakan pemilihan umum nasional sudah diumumkan pada 5 Oktober 1945, kemudian pada 1946 diadakan pemilihan umum di Karesidenan Kediri dan Surakarta yang cakupannya untuk lokal saja sedangkan untuk skala nasional masih belum bisa terealisasikan.[4] Bahkan sejak tahun 1950, janji-janji mengenai pemilihan umum nasional sudah sering dikemukakan oleh berbagai kabinet. Dalam kenyataannya, pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan umum untuk mengurusi hal-hal yang lebih penting dibandingkan dengan pemilihan umum, ditambah dengan adanya gerakan menentang diadakannya pemilihan umum yang dilancarkan oleh sejumlah partai serta kelompok-kelompok anggota parlemen sementara mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pemilihan umum.[5]

---

[3] Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid II*, Yogyakarta: LKiS, 2008, hlm. 63.

[4] Herbert, Feith, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999, hlm. 2.

[5] *Ibid.*, hlm.3

Pemilihan umum tahun 1955 ini merupakan pemilihan umum yang disiapkan dan diselenggarakan oleh tiga kabinet yang berbeda. Persiapannya dilakukan oleh kabinet Wilopo, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh kabinet Ali Sastroamidjojo dan kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Wilopo mempersiapkan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang pemilihan umum. Kabinet Ali Sastroamidjojo melaksanakan pemilihan umum sampai tahap kampanye kemudian diganti kabinet Burhanuddin Harahap yang melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu pemungutan suara. Peristiwa yang mendorong dan mempercepat adanya pemilu 1955 ini ialah Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu terjadinya demonstrasi di depan Istana Negara dan pengrusakan gedung parlemen oleh para demonstran dengan tujuan meminta pembubaran parlemen.[6]

Kabinet Wilopo berhasil menyusun undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum pemilihan umum, yakni Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 1953 beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 9/1954. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang menyebutkan bahwa kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa, kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan yang berkala dan jujur. Pemilihan itu dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin

---

[6] Imam Suhadi, *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977; Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1981, hlm. 6.

kebebasan mengeluarkan suara.[7] Setelah diterapkannya dasar hukum maka tahap berikutnya adalah masa kampanye yang dilakukan oleh partai politik untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Pada akhirnya partai bercorak Islam bersaing ketat dengan partai beraliran Nasionalis yang disaingi oleh partai berhaluan Komunis. Tujuan dari pemilihan umum tahun 1955 adalah pertama memilih anggota DPR yang akan duduk di pemerintahan, kedua membentuk Konstituante yang akan menyusun konstitusi yang tetap untuk menyempurnakan undang-undang yang masih bersifat sementara.[8]

Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 pada hakekatnya adalah realisasi dari Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta menyebutkan bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa cita-cita atas dasar kerakyatan benar-benar menjadi pedoman penghidupan masyarakat.[9] Akan tetapi dalam kenyataannya pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan, karena sejak akhir tahun 1945 tentara sekutu sudah mendarat di Jawa dan mulailah perjuangan bangsa kita mempertahankan kemerdekaannya. Keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mempunyai pemerintahan sendiri berdasar kemauan rakyat tidak hanya dicetuskan sejak negara kita merdeka, tetapi telah lama diperjuangkan sejak perjuangan kebangsaan yang dipelopori oleh HOS Cokroaminoto dan Dr.

---

[7] *Ibid.*, hlm. 1.

[8] Mohamad Roem, *Tinjauan Pemilihan Umum I dan II dari Sudut Hukum*, Bandung: Hudaya Dokumenta, 1971, hlm. 8.

[9] Imam Suhadi, *op.cit.*, hlm. 8.

Ciptomangunkusumo yang memperjuangkan di *volkstraad*[10] tahun 1918.[11] Kemudian GAPI (Gabungan Politik Indonesia) tahun 1939 menyerukan dan menuntut untuk mengadakan gerakan "Indonesia Berparlemen". Akan tetapi perjuangan tersebut belum berhasil sampai pemerintah Belanda menyerah kepada tentara Jepang.

Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri belum stabil karena saat itu Indonesia sedang menghadapi serangan dari Belanda dan sekutunya yang bermaksud untuk menguasai kembali Republik Indonesia. Oleh karena itulah pembahasan ini menjadi menarik, tatkala melihat upaya pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama di negara Indonesia ini agar berjalan sesuai harapan ditengah kondisi politik dalam negeri yang tidak kondusif. Walaupun demikian, oleh berbagai kalangan pemilihan umum 1955 dianggap sebagai pemilihan umum yang terbaik diantara beberapa pemilihan umum yang sudah dilaksanakan di Indonesia karena dianggap jauh dari kecurangan dan bersih dari hal-hal yang berbau politik padahal negara Indonesia baru tumbuh dan berkembang menjadi negara yang berdemokrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan menjadi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut.

---

[10] Volkstraad diambil dari bahasa Belanda yang berarti "Dewan Rakyat" yaitu semacam dewan perwakilan rakyat Hindia-Belanda.

[11] *Ibid.*, hlm. 10.

1. Bagaimanakah kondisi pemerintahan Indonesia sebelum pemilihan umum 1955?
2. Bagaimanakah proses pemilihan umum 1955 di Indonesia?
3. Bagaimanakah hasil pemilihan umum 1955 bagi bangsa Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

a. Melatih daya pikir logis, kritis, analitis, sistematis, dan objektif dalam mengkaji peristiwa.
b. Mengembangkan disiplin intelektual terutama profesi dalam bidang sejarah.
c. Sarana mempraktikkan penerapan metodologi penelitian sejarah.
d. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sejarah.

2. Tujuan Khusus

a. Mendeskripsikan kondisi pemerintahan Indonesia sebelum pemilihan umum 1955.
b. Mengetahui proses terjadinya pemilihan umum 1955 di Indonesia.
c. Mengetahui hasil pemilihan umum 1955 di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi Pembaca

a. Menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan kondisi pemerintahan Indonesia sampai dengan tahun 1955.

b. Memperluas pengetahuan tentang proses pemilihan umum 1955 di Indonesia.
c. Hasil penulisan ini diharapkan bisa menjadi acuan tentang penulisan berikutnya.
d. Meningkatkan kesadaran kepada pembaca untuk memahami sebuah peristiwa sejarah sebagai bahan refleksi.

2. Bagi Penulis

a. Menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam menganalisa dan merekontruksi peristiwa sejarah yang disajikan dalam bentuk tulisan.
b. Melatih penulis untuk berfikir lebih objektif dan kritis.
c. Menambah referensi sejarah mengenai sejarah Indonesia, khususnya periode awal kemerdekaan sampai pemilihan umum 1955.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan sebuah penelitian atau karya ilmiah diperlukan kajian pustaka. Kajian Pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau teori yang menjadi landasan pemikiran.[12] Hal ini dimaksudkan supaya peneliti atau penulis dapat memperoleh data-data atau informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang akan dikaji. Kajian pustaka sangat dibutuhkan untuk menyusun peta konsep dan landasan bagi peneliti. Penyusunan karya ini menggunakan beberapa literatur, baik buku, artikel, penulisan hasil penelitian, maupun literatur lainnya.

---

[12] A. Daliman, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2006, hlm. 3.

Sebagian besar bab dalam penelitian ini akan dibahas menggunakan buku Karya Herbert Feith yaitu *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (1999) yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia diterjemahkan oleh Nugroho Katjasungkana dkk juga dari Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pemilihan Umum 1955. Selain itu, menggunakan artikel dari koran-koran yang memuat peristiwa pemilihan umum 1955 di Indonesia.

Dalam buku yang ditulis oleh Herbert Feith yang berjudul Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, dijelaskan mengenai proses pemilihan umum yang dimulai dari masa kampanye partai-partai politik pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo. Setelah itu dijelaskan mengenai pemungutan suara yang dilakukan di daerah-daerah di seluruh wilayah republik Indonesia dan di bagian akhir merupakan analisis hasil pemilihan umum dari sang penulis. Perbedaan dengan penulis adalah penulis mencantumkan kondisi politik pemerintahan sebelum pemilihan umum 1955 pada bagian penyusunan skripsi.

Pemilihan umum 1955 merupakan praktek demokrasi bagi negara Indonesia yang baru merdeka dengan tujuan untuk menyalurkan aspirasi dikalangan elit politik pada waktu itu pun demikian pemilihan umum tahun 1955 disebut berbagai kalangan merupakan pemilihan umum yang sukses jauh dari kecurangan. Pemilihan umum yang pertama selalu membawa perubahan-perubahan besar pada fungsi partai politik, dan mengakhiri situasi ketika kegiatan partai politik hampir semata-mata ditentukan oleh percaturan politik di ibukota negara.[13] Intinya pemilu yang pertama ini merupakan tonggak awal bagi sistem

---

[13] Herbert, Feith, *op.cit.*, hlm. 9.

demokrasi negara Indonesia kedepannya dan juga menjadi acuan bagi pemilu-pemilu selanjutnya.

Selanjutnya adalah buku karya Imam Suhadi dengan judul *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977; Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi* yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 1981. Buku ini menjelaskan maksud dan tujuan diadakan pemilu tahun 1955, landasan hukum pemilu 1955, pelaksanaan pemilu 1955 dan pengaruhnya. Dalam buku ini dipaparkan mengenai sistem pemilihan umum yang dapat mengantarkan kepada demokrasi yang wajar, parlemen yang berfungsi sekaligus menjamin hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi pada umumnya. Pemilihan umum sesuai dengan ciri-ciri negara demokrasi modern untuk melaksanakan kehendak rakyat melalui sistem seleksi atau pemilihan orang-orang cakap dengan delegasi atau penyerahan. Indonesia adalah negara yang demikian luas dan tidak mungkin melaksanakan demokrasi secara referendum seperti di Swiss dan demokrasi kuno di Yunani sehingga dilakukan pemilihan umum.[14]

Sejak 1950 berbagai kabinet yang silih berganti memerintah gagal memenuhi janjinya untuk menyelenggarakan Pemilu. Kabinet Dr. Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) dan Suwiryo (PNI) ditunjuk oleh Presiden Soekarno tanggal 26 April 1951 dengan salah satu program kabinetnya adalah mempercepat persiapan-persiapan Pemilihan Umum tapi pada akhirnya kabinet ini tidak berusia lama karena mendapat tantangan dalam parlemen termasuk dari Masyumi dan

---

[14] Koentjoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Jakarta: PT Eresco, 1975, hlm. 17.

PNI sendiri.[15] Presiden Soekarno kemudian menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur,[16] akan tetapi kedua formatur tersebut tidak dapat membentuk kabinet yang kuat karena tidak ada kesepakatan mengenai calon-calon yang akan didudukkan dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret, kedua formatur mengembalikan mandatnya dan presiden menunjuk Wilopo (PNI) sebagai formatur baru.[17]

Pertikaian militer versus sipil pada peristiwa 17 Oktober 1952 membuat situasi politik dalam negeri terus mendidih. Kabinet koalisi PNI-Masjumi-PSI yang dipimpin Wilopo sebetulnya sudah goyah dengan berbagai persoalan politik yang terjadi baik di dalam maupun di luar parlemen. Tuntutan pembubaran parlemen oleh sekelompok militer dalam peristiwa 17 Oktober 1952 yang kemudian ditolak oleh Presiden Soekarno, perlahan beralih menjadi isu penyelenggaraan pemilu. Pada November 1952 Kabinet Wilopo mengajukan rancangan undang-undang pemilihan umum baru yang mendapat sokongan dari beberapa kalangan. Kabinet Wilopo berakhir dan digantikan oleh Ali Sastroamidjojo. Namun belum lagi pemilu diselenggarakan, krisis politik mendera kabinet Ali Sastroamidjojo yang membuatnya jatuh. Kabinet Ali Sastroamidjojo digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Pemilu baru berhasil diselenggarakan di bawah pemerintahan Burhanuddin Harahap.

---

[15] *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 214.

[16] Formatur adalah orang-orang yang ditugasi membentuk suatu badan (kabinet, pengurus, organisasi,dsb)

[17] *Arsip Nasional Republik Indonesia*, Jakarta: Proyek Pemasyarakatan dan Diseminasi Kearsipan Nasional, 2004, hlm. 1.

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi merupakan rekonstruksi sejarah melalui proses pengujian dan menganalisis secara kritis dari peninggalan masa lampau.[18] Pengertian historiografi sendiri ada yang berupa pengertian sempit dan pengertian luas, untuk pengertian sempit historiografi berarti perkembangan penulisan dalam peradaban dunia sedangkan dalam pengertian luas historiografi diartikan sebagai perkembangan penulisan yang didalamnya memuat teori dan metodologi sejarah.[19] Dalam penulisan skripsi ini, digunakan beberapa sumber-sumber yang berkaitan antara lain:

Skripsi karya Nur Efri Setyadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul ”Eksistensi Masyumi pada Pemilihan Umum 1955”. Skripsi ini memfokuskan pada peran partai Masyumi dalam pemilihan umum 1955 yang merupakan satu diantara empat partai besar pemenang pemilu dan dipaparkan pula hasil pemilu 1955. Perbedaannya dengan skripsi yang dibahas oleh peneliti yaitu, peneliti membahas proses pemilihan umum 1955 yang diikuti beberapa partai tidak hanya Masyumi saja.

Kedua adalah skripsi karya Muhamad Sulthon Fatawi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang berjudul “Dinamika Politik Pada Pemilu 1955 di Kediri”. Skripsi ini memfokuskan pada keadaan politik di Kediri

---

[18] Ankersmith, *Refleksi tentang Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984, hlm. 268.

[19] Anggar Kaswati. *Metodologi Sejarah dan Historiografi*. Yogyakarta: Beta Offset, 1998, hlm. 27-28.

sebelum Pemilu 1955 dan perkembangannya setelah pemilu 1955. Perbedaannya dengan skripsi yang dibahas oleh peneliti adalah peneliti mengambil proses dan perkembangan pemilu secara keseluruhan dan tidak memfokuskan pada suatu daerah atau dalam kata lain secara nasional.

Ketiga adalah skripsi karya Nugraha Widya Putra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul "Pengaturan Hak Pilih TNI dan Polri Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi Perbandingan Pemilu 1955, Orde Baru dan Era Reformasi)". Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan hak pilih TNI dan Polri dalam sistem demokrasi di Indonesia pada pemilu tahun 1955, Orde Baru dan Era Reformasi. Perbedaannya dengan skripsi yang dibahas oleh peneliti adalah peneliti didalam bab pembahsannya mencamtumkan kriteria hak pilih bagi semua warga negara, tidak hanya TNI dan Polri saja.

G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian sejarah pada dasarnya terikat pada prosedur metode sejarah. Metode sejarah sendiri merupakan aturan serta prinsip yang sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif dan menilainya secara kritis yang dibuat dalam bentuk tulisan. Diperlukannya metode adalah sebagai cara untuk mendapatkan obyek. Juga dikatakan bahwa metode adalah

cara untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur.[20]

Dalam suatu penulisan sejarah setidaknya ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu manusia atau pelaku, tempat, waktu, dan peristiwa atau aktivitas manusia itu sendiri. Untuk menghasilkan suatu karya sejarah yang bermutu, diperlukan suatu metode sejarah yang dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lampau. Penulisan sejarah mempunyai metode sendiri dalam mengungkapkan suatu peristiwa masa lampau agar menghasilkan suatu karya sejarah yang logis, kritis, ilmiah dan obyektif.[21]

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan sejarah ini adalah metode penulisan menurut Kuntowijoyo. Adapun tahapan penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, intepretasi dan penulisan.[22]

a. Pemilihan topik

Pemilihan topik merupakan sebuah langkah awal dalam sebuah penelitian untuk menentukan permasalahan yang akan dikaji. Penentuan topik harus dipilih berdasarkan kedekatan intelektual dan kedekatan

---

[20] Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 11.

[21] Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 33-34.

[22] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 2005, hlm. 91.

emosional.[23] Dua syarat tersebut penting karena akan berpengaruh pada aspek subjektif dan objektif, karena seorang peneliti akan bekerja dengan baik apabila peneliti menyukai topik yang ada dan mampu menyelesaikan penelitian yang dilakukannya.

b. Heuristik

Heuristik berasal dari kata *heuriken* yang berati memperoleh atau menemukan. Heuristik disini merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang dikenal dengan data sejarah. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang ditulis. Data sejarah yang terkumpul dikelompokan berdasarkan jenis sumber sejarah.

Heuristik (pengumpulan data) merupakan kegiatan untuk menemukan sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, seperti buku, jurnal, majalah, koran, dan foto-foto. Untuk menjadikan historiografi perlu dicari sumber-sumbernya, baik sumber primer, sekunder, tersier maupun historis. Tahap ini digunakan penulis untuk melakukan proses pencarian dan berbagai sumber literatur di berbagai perpustakaan yang mempunyai koleksi buku atau menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Perpustakaan yang menjadi tujuan penulis antara lain: Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, Laboratorium Pendidikan Sejarah UNY, Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta, Perpustakaan St. Kolese Ignatius Kota Baru Yogyakarta, dan Kantor Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta.

---

[23] *Ibid.*, hlm. 92.

Sumber sejarah merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam penyusunan penelitian karena sumber sejarah merupakan instrument utama dalam pengolahan data dan merekontruksi sejarah. Berdasarkan bahannya, sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis (dokumen) dan sumber tidak tertulis (*artifact*). Dokumen dapat berupa surat-surat, notulen rapat, kontrak kerja, sedangkan artifact berupa foto-foto, bangunan dan alat-alat.[24] Sedangkan sumber-sumber sejarah menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut.

1) Sumber Primer

Sumber primer dapat diperoleh dari pelaku atau kesaksian secara langsung oleh seseorang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Menurut Louis Gottschalk sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya yang selanjutnya disebut sebagai saksi mata.[25]

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Arsip Nasional Republik Indonesia. 2004. Jakarta: Proyek Pemasyarakatan dan Diseminasi Kearsipan Nasional.

---

[24] Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian Sejarah*, Jakarta: Dephankam, 1971, hlm. 135.

[25] Louis Gottschalk, "*Understanding History*".ab, Nugroho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975, hlm. 35.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata, yakni seorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkannya.[26] Pada umumnya semakin jauh waktu sumber sekunder dibuat dari peristiwa yang dikisahkan, maka sumber sekunder tersebut semakin dapat dipercaya.[27] Adapun sumber sekunder yang digunakan penulis sebagai berikut:

Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Imam Suhadi. 1981. *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977; Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Mohamad Roem. 1971. *Tinjauan Pemilihan Umum I dan II dari Sudut Hukum*. Bandung: Hudaya Dokumenta.

Harmaily Ibrahim. 1981. *Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.

Arbi Sanit. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Baskara T. Wardaya. 2004. *Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955*. Jurnal Basis Edisi No. 03-04 Maret-April 2004. Yogyakarta

c. Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi (Kritik Sumber) merupakan kegiatan meneliti untuk menentukan validitas dan reabilitas sumber sejarah melalui kritik ekstern dan intern. Kritik sumber dilakukan sebagai upaya untuk menentukan apakah sumber data yang didapat valid dan dapat dipertanggung jawabkan

---

[26] *Ibid*., hlm. 35-36.

[27] *Ibid*., hlm. 78.

kebenarannya secara substansial maupun secara fisik. Mencari kelemahan dan kelebihan dari data yang telah didapat dan memberikan solusi dalam penulisan sejarah. Melalui *kritik sumber* diharapkan setiap data-data sejarah yang diberikan oleh informan hendak diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya, sehingga semua data itu *sesuai* dengan fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya.

Menurut Kuntowijoyo, kritik sumber adalah kegiatan meneliti untuk menentukan validitas dan reabilitas sumber sejarah melalui kritik ekstern dan intern.[28] Kritik eksternal ingin menguji otentisitas (keaslian) suatu sumber, agar diperoleh sumber yang sungguh-sungguh *asli* dan bukannya *tiruan* atau *palsu.* Sumber yang asli biasanya waktu dan tempatnya diketahui. Makin luas dan makin dapat dipercaya pengetahuan kita mengenai suatu sumber, akan makin asli sumber itu. Sedangkan kritik internal menguji lebih jauh mengenai *isi* dokumen. *Uji kredibilitas* disebut juga *uji reliabilitas.* Artinya sejarawan ingin menguji seberapa jauh dapat dipercaya *kebenaran* dari isi informasi yang diberikan oleh suatu sumber atau dokumen sejarah.

d. Interpretasi

Interpretasi merupakan langkah untuk menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta sejarah yang diperoleh. Hal ini dilakukan setelah diterapkannya *kritik ekstern* maupun *kritik Intern* dari

[28] Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm.100-101.

data-data yang telah dikelompokkan. Interpretasi juga bisa dikatakan sebagai sumber subyektifitas. Dalam hal ini penulis dituntut untuk bisa kreatif dan imajinatif dalam menulis. Dalam interpretasi dibagi menjadi dua tahap yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan yang nanti akan menghasilkan sebuah fakta. Sedangkan sintesis adalah menyatukan. Dengan dikumpulkannya data-data yang ada maka akan memunculkan sebuah fakta.[29]

Untuk menemukan fakta sejarah maka dilakukan sebuah analisis dan untuk menyatukan hasil intepretasi penulis terhadap data yang diperoleh dilakukan sintesis. Pada tahap interpretasi penulis berusaha menguraikan sumber dan mengaitkan fakta kemudian mengolah dan menganalisis dengan menggunakan pendekatan sehingga mempunyai arti dan bersifat logis. Penulis dapat menafsirkan fakta sejarah yang ditemukan dan telah melalui proses verifikasi sehingga dapat menghasilkan sebuah karya. Dalam tulisan ini penulis mencoba membangun pemahaman dan menangkap makna dari proses awal Pemilihan Umum 1955 hingga perkembangan hasilnya, serta dampak yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut.

e. Historiografi

Historiografi merupakan kegiatan menyusun fakta-fakta menjadi sejarah, setelah melakukan sumber, penilaian sumber, penafsiran sumber kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk tulisan.

[29] *Ibid*., hlm. 102-103.

Aspek kronologis sangat penting dalam penulisan sejarah karena dapat mengetahui perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam suatu peristiwa sejarah.[30] Dalam tahap ini diperlukan suatu imajinasi historis yang baik sehingga fakta-fakta sejarah menjadi kajian utuh sistematis,serta komunikatif.

Historiografi adalah tahapan akhir penulis untuk menyajikan fakta dalam bentuk tulisan. Penyajian penulisan dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian: (1) Pengantar, (2) Hasil Penelitian, (3) Simpulan. Dukungan sumber-sumber yang valid serta lengkap, akan membantu penelitian ini menjadi penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan pula sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan sejarah perlu adanya pengkajian metodologi dimana dalam metodologi tersebut diperlukan pendekatan ilmu lainnya. Penulisan sejarah tidak hanya menceritakan peristiwa akan tetapi menerangkan kejadian yang menjadi sebab-akibat, kondisi lingkungannya dan juga konteks sosial dan budaya. Penelitian ini akan menggunakan Pendekatan Multidimensional yang termasuk dalam pendekatan ilmu sosial. Pendekatan Multidimensional adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dua atau lebih rumpun ilmu yang relevan.[31]

---

[30] *Ibid*., hlm. 103.

[31] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah.* Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 87.

Penulisan sejarah tidak hanya bersifat deskriptif analisis, tetapi dikembangkan dengan menggunakan beberapa pendekatan yang multidimensional, yaitu mendekati suatu peristiwa dengan berbagai aspek kehidupan politik, sosiologi, kultural dan ekonomi. Apalagi perkembangan ilmu sosial membuka horison-horison baru dalam memperkaya penulisan sejarah.[32] Dalam skripsi ini, akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, politik dan militer.

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan peranan faktor sosiologis yang menjelaskan peristiwa masa lalu.[33] Dalam kerangka konseptualnya, sosiologis banyak mencakup konsep dan teori sosiologis. Pendekatan sosiologis membantu untuk menganalisis berbagai konflik kepentingan, terutama konflik/ ketegangan antar partai mengenai kepentingan-kepentingan dari partai tersebut dalam pemilu 1955.

b. Pendekatan Politik

Pendekatan politik menurut Delian Noor adalah segala usaha, tindakan atas suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu negara dengan bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah dan mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Menurut Sartono Kartodirjo pendekatan politik adalah pendekatan yang menyoroti struktur

---

[32] Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, hlm. 97-98.

[33] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983, hlm. 46.

kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain sebagainya.[34] Dalam penulisan sejarah ini, tinjauan politik digunakan untuk menjelaskan peran perkembangan dari ideologi nasionalis melawan ideologi agama dan ideologi komunis saling bersaing mendapatkan simpati rakyat dalam pemilihan umum. Sistem multi partai yang diterapkan di negara ini mendorong lahirnya instabilitas politik dalam negeri karena tiap partai saling bersaing untuk memenuhi ambisi politiknya di pemerintahan.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi yang berjudul 'Proses Pemilihan Umum 1955 di Indonesia" secara sistematis terdiri dari lima bab. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang skripsi ini, maka peneliti akan memberikan gambaran singkat tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sejarah kritis, serta sistematika pembahasan yang berisi garis besar dari isi skripsi ini.

BAB II. KONDISI POLITIK SEBELUM PEMILIHAN UMUM 1955

Bab ini menjelaskan kondisi pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan, pelaksanaan Demokrasi Liberal, kabinet Wilopo dan kabinet Ali Sastroamidjojo yang dimulai dari tahun 1950.

---

[34] Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 5.

BAB III. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 1955

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan pemilu 1955 pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, persiapan pemilu, landasan hukum, partai-partai peserta pemilu dan kampanye pemilu.

BAB IV. HASIL PEMILIHAN UMUM 1955

Bab ini menganalisis hasil dari pemilihan umum 1955 yang berisi hasil pemungutan suara yang dilakukan di berbagai tempat di Indonesia serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia.

BAB V. KESIMPULAN

Bab ini merupakan simpulan singkat dari pembahasan sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam bab pendahuluan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN